

MUHAMMAD SEBAGAI PEMIMPIN AGAMA DAN KEPALA NEGARA

Sutriani

*Jurusan Pendidikan Agama Islam
Guru SMP Negeri 31 Makassar*

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang kedudukan Rasulullah Saw di Mekkah dan di Madinah dalam dua posisi yang berbeda. Di Mekkah Rasulullah Saw hanya sebagai pemimpin Agama karena loyalitas formal sebagai pemimpin dari struktur kekuasaan beliau tidak peroleh karena adanya penentangan terhadap dakwah yang dibawa beliau, sedangkan di Madinah selain sebagai pemimpin Agama beliau juga sebagai Kepala Negara dengan mempertautkan antara agama dan negara dan membangun Islam sebagai agama dan negara sebagai satu kesatuan yang harmonis.

Keywords:

Muhammad Saw., Pemimpin Agama, Negara Madinah

A. Pendahuluan

Sangat sedikit yang mengetahui dengan pasti tentang kehidupan dan keadaan Muhammad pada waktu muda yang menjadi pengetahuan umum, Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 M. di kota Mekkah.¹ Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Muthalib seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya dikalangan orang-orang Arab. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah, baik dari ayah maupun ibunya keduanya berasal dari Silsilah Nabi Ibrahim dan Ismail.²

Pada waktu munculnya Nabi Muhammad Saw. bangsa Arab sedang melewati suatu masa jahiliyah, seluruh kehidupan Arab terjerumus kedalam kenistaan, pelanggaran sosial, penyembahan berhala dan politeisme merupakan tatanan masyarakat pada waktu itu.³

Ketika Nabi Muhammad Saw. mulai menyiarkan agama Islam yang beliau terima dari Allah Swt. di Mekkah. Kota ini mempunyai sistem kemasyarakatan dibawah pimpinan suku bangsa Quraisy, akhirnya Nabi bersama sahabatnya hijrah ke Madinah karena tidak tahan terhadap kekejaman-kekejaman dan kebencian-kebencian yang brutal dari orang Quraisy, Nabi menyalurkan perhatiannya untuk mencari tempat baru bagi kegiatan dakwahnya,⁴ di Mekkah nabi telah memperoleh sekelompok pengikut yang sangat sedikit jumlahnya.⁵

Dari catatan sejarah dapat diketahui bahwa, Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. ada dua aktifitas yang dilakukan setibanya di Madinah yaitu mendirikan Masjid Quba dan kota Madinah.⁶ Hijarah merupakan titik balik dari karir Nabi Muhammad Saw. terhadap kebangkitan Islam. Muhammad Saw. mempunyai pengaruh yang mendalam dan mempunyai pengikut. Selama di Mekkah, Nabi hanya berfungsi sebagai kepala agama dan tidak mempunyai fungsi sebagai kepala pemerintahan karena kekuasaan politik yang ada di Mekkah belum dapat dijatuhkan pada waktu itu. Di Madinah sebaliknya disamping menjadi kepala agama juga menjadi kepala pemerintahan.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: peranan Nabi sebagai kepala agama di Mekkah, Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa tampil sebagai pemimpin negara di Mekkah, proses Nabi Muhammad memperoleh otoritas kepemimpinan sehingga menjadi kepala negara di Madinah serta sistem yang digunakan Nabi sebagai kepala negara dalam menjalankan politiknya.

B. Dakwah Muhammad Saw. di Mekkah

Seperti diketahui bahwa Nabi mulai berdakwah dan menerima wahyu yang kedua, beliau melakukan dakwah terbatas pada lingkungan keluarga dekatnya saja.⁸ Beliau melakukan dakwah semi rahasia kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat dari Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib akhirnya turun perintah Allah untuk melakukan secara terang-terangan kepada masyarakat luas.

Dakwah Nabi Muhammad Saw. di Mekkah mendapat tantangan dan perlawanan keras dari masyarakat baik aktif maupun pasif, mereka melakukan pemboikotan ekonomi, menyiksa fisik para pengikutnya, teror mental dan rencana pembunuhan terhadap beliau, mereka juga mengajak bernegosiasi dengan tawaran harta, tahta dan wanita agar beliau menghentikan dakwahnya, tidak hanya itu mereka juga mencari kompromi dengan Nabi dalam beribadat agar sewaktu-waktu Nabi bersedia untuk menyembah berhala-berhala mereka di waktu lain mereka ikut pula menyembah Tuhan yang disebut-sebut Nabi, tetapi meskipun Nabi mendapat tawaran yang menggiurkan dan pembunuhan dari masyarakat Mekkah, tekadnya tidak surut untuk menyiarkan agama Islam.⁹

Langkah dakwah Nabi selanjutnya menyeru masyarakat umum mengajak kepada Islam dengan terang-terangan baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya, kegiatan dakwah dilaksanakan tanpa mengenal lelah dengan usahanya yang gigih membuahkan hasil yang diharapkan. Hal itu mulai terlihat jumlah pengikutnya semakin bertambah meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah namun semangat mereka sungguh membaja.¹⁰ Setelah dakwah terang-terangan pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul melihat semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi begitu pula tantangan yang dilancarkan suku Quraisy semakin gencar pula tantangan yang dilakukan.

Ahmad Salabi mengatakan ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam yakni :

1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhamad Saw. berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib.
2. Nabi Muhammad Saw. menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya.
3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan akhirat.
4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab.¹¹
5. Mereka akan takut hilang mata pencahariannya seperti membuat patung.

C. Perspektif Pemerintahan di Mekkah

Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku (kabilah-kabilah) dan masing-masing berdiri sendiri satu sama lain saling bermusuhan kesadaran dan keinsafan mereka akan disiplin dan ketaatan amat tipis kelihatannya karena belum memiliki masyarakat yang teratur dan tertib yang patuh kepada pucuk kepemimpinan mereka kurang mengenal rasa nasional dan yang ada hanyalah ikatan kabilah mayoritas mereka hanya kepala suku tidak kepada negara.¹²

Selama Nabi Muhammad Saw. menjalankan misi kenabiannya di Makkah maka mayoritas penduduknya tidak menerima bahkan menentang dan menganiayanya. Ini berarti bahwa, loyalitas formal sebagai pemimpin dari struktur kekuasaan beliau tidak diperoleh. Dengan demikian, beliau tidak berfungsi sebagai kepala negara. Pemilihan umum misalnya, amat perlu dilaksanakan disebuah negara republik dalam mengupayakan adanya loyalitas itu tanpa ada hubungan seperti itu, maka kepemimpinan seseorang akan rapuh dan bagi rasul tidak menginginkannya. Senada dengan itu, Harun Nasution berpendapat bahwa, di Makkah Nabi hanya berfungsi sebagai kepala agama dan tanpa mempunyai fungsi kepala pemerintahan karena kekuasaan politik belum dapat dijatuhkan pada waktu itu.¹³

Dengan demikian, periode Makkah terjadi dengan figur Muhammad sebagai pemimpin agama. Dalam periode ini Nabi Saw. mengalami hambatan dan kesulitan dalam menyiarkan agamanya kepada kaum Quraisy. Dalam hal ini Nabi belum berpikir menyusun suatu masyarakat Islam secara teratur.

D. Proses Muhammad Memperoleh Otoritas sebagai Kepala Negara

Baiat al-Aqabah pertama dan kedua adalah merupakan landasan pertama bagi otoritas kepemimpinan Muhammad di Madinah, di *Aqabah* Mina sebanyak dua belas laki-laki penduduk Yasrib menemui Nabi menyatakan masuk Islam dalam baiat ini, mereka mengakui kerasulan Muhammad dan berjanji kepada beliau tidak akan menyembah selain Allah dan menyekutukannya tidak akan mencuri, tidak akan berzinah, membunuh anak-anaknya tidak akan berbohong kepada Nabi, jika mendustakan dihukum dengan tebusan (*kafarat*) serta disiksa di akhirat.¹⁴

Ketika rombongan ini kembali ke Yasrib, Nabi menunjuk Mus'ab bin Umair menyertai mereka sekaligus ia mengajarkan Islam kepada mereka, sejak itu ummat Islam semakin banyak di kota ini, hal ini terbukti pada musim haji tahun 622 M. datang serombongan haji sebanyak 73 orang baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Mereka didampingi oleh Mus'ab bin Umair kedatangan mereka kali ini untuk mengajak nabi berkenan hijrah ke Yasrib, pertemuan inilah yang terjadi pada baiat kedua dimana mereka mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka dan akan menjaga keselamatan beliau dan para pengikutnya.¹⁵ Berdasarkan dari baiat inilah, Nabi memerintahkan kaum muslimin Makkah agar hijrah ke Yasrib kemudian disusul oleh beliau bersama Abu Bakar keduanya tiba di Yasrib 16 Rabiul awal/20 September 622 M.¹⁶

Kedatangan Nabi Muhammad disambut dengan suka cita dianggap sebagai pemimpin yang berpengaruh besar di Madinah. Di antara mereka sebelumnya sering terjadi pertentangan dan permusuhan.¹⁷

Sementara menurut ahli sejarah, belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu dideklarasikannya suatu piagam yang mengatur suatu kehidupan dan hubungan antar komunitas yang merupakan komponen masyarakat yang majemuk di

Madiyah. Langkah pertama dan kedua ditunjukkan untuk konsolidasi ummat Islam. Langkah-langkah beliau berikutnya ditunjukkan kepada penduduk Madinah untuk ini Nabi membuat kesepakatan tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat dikalangan kaum muslimin dan kaum yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan menekankan kerja sama dan persamaan hak dan kewajiban atas semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian dan menetapkan bagi Nabi untuk menangani dan memutuskan segala perbedaan pendapat yang timbul diantara mereka. langkah-langkah nabi menurut Watt telah menciptakan situasi baru dalam menghilangkan atau memperkecil pertentangan di antara suku-suku.¹⁸

Banyak diantara pakar ilmu politik Islam mengatakan piagam Madinah sebagai kontribusi negara Islam pertama yang dicanangkan Nabi di Madinah perilaku Nabi pada permulaan periode Madinah bahwa sejak semula Islam mempertautkan dengan erat antara agama dan negara.¹⁹

Para ahli mengakui keterpaduan tugas ini dalam diri Muhammad Saw. sebagai Rasul dan kepala negara Islam dikatakan H.A.R Gibb menyatakan agama Islam tidak hanya menyangkut agama semata, tetapi juga mampu membentuk masyarakat yang merdeka, lengkap dengan perangkat undang-undang dan sistem pemerintahan yang spesifik. Senada dengan itu, C.A Nallino mengatakan bahwa selama hidupnya Muhammad telah sukses membangun Islam sebagai agama dan sebagai negara yang harmonis.²⁰

Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad Saw. adalah sebagai pemimpin agama dan juga sebagai kepala negara yaitu di Madinah.

E. Sistem Pemerintahan Negara Madinah

Sebagai kepala negara untuk setiap keputusan yang beliau tetapkan Nabi Muhammad Saw. selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat tidak bersikap otoriter, kiranya perlu dicatat dalam proses musyawarah sebagaimana yang ditetapkan oleh rasulullah berhak mengeluarkan pendapat tentang sesuatu yang menjadi pokok masalah beliau tidak pernah bersikap atau memperlihatkan tanda-tanda bahwa beliau lebih dominan daripada sahabat-sahabatnya sebagai mitra dalam pengambilan setiap keputusan yang penting, yang berkaitan dengan negara Madinah, beliau sangat menghargai perbedaan pendapat walaupun sebagai kepala negara mungkin memiliki pendapat sendiri yang berkaitan dengan kebijaksanaanya.²¹

Prinsip persamaan sangat berkaitan erat dengan prinsip keadilan, Nabi tidak membedakan kedudukan sipelaku pidana, apakah ia seorang pembesar atau penguasa mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Muhammad Saw. dan sebagai kepala negara di Madinah tidak merasa dirinya lebih dari yang lain sesuai dengan doktrin Alqur'an ukuran kelebihan seseorang terletak pada tingkat taqwanya, beliau memperlakukan Bilal yang kulit hitam semula budak sama dengan pengikut yang lainnya. Bahkan diangkat sebagai muazzin beliau senantiasa menghindar dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai kepala negara.²²

Nabi Muhammad Saw. menerapkan prinsip kebebasan dalam Islam misalnya dalam kebebasan beragama orang Yahudi bebas melaksanakan agama mereka dan karena itu kaum muslimin di Madinah tidak boleh meghalangi mereka untuk beribadah dalam hubungan dengan kewajiban pemerintah Madinah untuk melindungi

orang-orang non-muslim, yang dinamakan kaum *dzimmy*. Begitu besar perhatian Rasulullah selaku kepala negara di Madinah terhadap non-muslim beliau memperingatkan pengikutnya supaya tidak memusuhi golongan *dzimmy* itu, karena keselamatan dan keadaan mereka menjadi tanggung jawab kepala negara baik orang Yahudi maupun Kristen memiliki kebebasan penuh.²³

Selain itu yang perlu diperhatikan ialah, meskipun pada masa Rasulullah orang yang belum mengenal teori pemisahan ataupun pembagian kekuasaan namun beliau telah mewujudkan dalam pemerintahannya. Pembagian tugas kenegaraan dengan cara mengangkat orang yang memenuhi syarat misalnya *wazier* (menteri) *katib* (sekretaris) *wali* (gubernur) *'amil* (pengelola zakat) *qadhi* (hakim) sudah ada pada masa Rasulullah.²⁴

Untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan militer, ummat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan :

1. Untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya.
2. Menjaga keselamatan dalam penyebaran dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya.²⁵

Ciri khas pemerintahan dalam Islam menurut Abu al-A'la al-Maududi adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan perundang-undangan Ilahi
2. Keadilan antar manusia
3. Persamaan antara kaum muslimin
4. Tanggung jawab pemerintah
5. Permusyawaratan
6. Kekuasaan dalam hal kebijakan
7. Berusaha untuk mencari kekuasaan diri sendiri adalah terlarang
8. Tujuan adanya negara
9. Amar ma'ruf nahi munkar.²⁶

F. Kesimpulan

1. Peran Nabi Muhammad Saw. di Makkah sebagai kepala agama telah mampu mewujudkan non negara. Ajaran Islam dapat diaktualisasikan sesuai dengan kemampuan sehingga terbentuk masyarakat muslim yang siap menjalankan hukum dan ajaran agama yang kesiapan masyarakat terikat pada faktor iman dan amal shaleh.
2. Nabi Muhammad Saw. tidak bisa tampil sebagai kepala negara di Makkah bukan semata karena faktor masyarakat mengenal ajaran tauhid tetapi lebih dari itu adalah dominasi kecemburuan sosial, kesamaan hak kekhawatiran hilangnya sumber ekonomi utamanya kekuatan tergesernya kemapanan sistem struktur kekuasaan para tokoh Quraisy apabila Islam berkembang dan menjadi agama masyarakat.
3. Proses Nabi Muhammad Saw. memperoleh otoritas kepala negara bermula dari *bai'at al-aqabah* sebuah perikatan berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai agama yang konsekuensinya adalah terwujudnya masyarakat muslim yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasulullah. Dengan demikian, terbentuklah masyarakat muslim yang pertama dengan fungsi-fungsi sederhana dalam sebuah masyarakat dan negara Madinah (kota).

4. Sistem yang digunakan Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan politiknya adalah syariah dengan mengutamakan politik musyawarah yang menekankan persamaan dan keadilan dalam mewujudkan kerja sama antara komunitas yang ada dengan otoritas sebagai Rasul dalam memutuskan berbagai masalah yang timbul.

Endnotes

¹ Lihat, Cyril Glasse, *Enslikopedi Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mashadi (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 275.

² *Ibid.*, h. 276.

³ Lihat, Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: kota Kembang, 1998), h.18.

⁴ Lihat, Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I (Cet. V; Jakarta: UI Press 1986), h. 92. Lihat juga Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah dan Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta: UI Press), h. 1.

⁵ Lihat, Fazlur Rahman, *Islam*, Diterjemahkan oleh Amin Ahmad (Bandung: pustaka, 1984), h. 12.

⁶ Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 119. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. XII; Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 25.

⁷ Lihat, Harun Nasution, *Teologi Islam dan Analisa Perbandingan*, *op.cit.*, h. 3.

⁸ Lihat, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1996), h. 992.

⁹ Lihat, J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah di Tinjau Dari Pandangan al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 49. Lihat juga Badri Yatim, *op.cit.*, h. 20.

¹⁰ *Ibid.* H. 14.

¹¹ Lihat, Ahmad Salabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993), h. 87-90. Lihat juga Badri Yatim, *op.cit.*, h. 20.

¹² Huston Smith, *The Religion of Man*, diterjemahkan oleh Safruddin Bahar, Agama-agama Manusia (Cet. III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h. 256.

¹³ Lihat, Harun Nasution, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, *op.cit.*, h. 92.

¹⁴ Ibnu Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyah*, ditahqiq oleh, Suhail Zakar. (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 91. Lihat juga Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (cet. V; Jakarta: Ui Press, 1993), h. 8-9.

¹⁵ J.Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 52.

¹⁶ Lihat, Fazlur Rahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Sanroji Shaleh (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 21. Lihat juga J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 53.

¹⁷ Muhammad Izzah Darwajjah, *Sirat al-Rasul Saw*, (Cet. I; Cairo: Isa al-Bab al-Halaby Wa Auladuh, 1965), h. 17-18.

¹⁸ J. Suyuthi pulungan, *op.cit.*, h.6.

¹⁹ Muhammad Tahir Ashari, *op.cit.*, h. 33 dan 119.

²⁰ Lihat, J. Sayuthi Pulungan, *op.cit.*, h.77. Lihat juga H.A.R Gibb *Mohammadanism And Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1996), h. 3.

²¹ Muhammad Tahir Azhari, *op.cit.*, h. 119-120. Lihat juga Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Cet. V; Jakarta: UI Press 1993), h. 16-17.

²² *Ibid.*, h. 120-122.

²³ *Ibid.*, h. 122-123.

²⁴ *Ibid.*, h. 126.

²⁵ Badri Yatim, *op.cit.*, h. 27.

²⁶ Abu al-A'la al-Maududi, *Khalifah al-Mulk*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, dengan judul *Khalifah dan Kerajaan* (Cet. VI).